



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM (LKj-IP) TAHUN 2015

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Dasar pembuatan LAKIP ini adalah Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini berisi informasi pengukuran kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dan dalam konteks untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Samarinda,
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. RUSMADI, MS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621030 198803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan fenomena yang berkembang belakangan ini. Keinginan untuk perubahan tersebut di atas bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam penyelenggaraan SAKIP meliputi Perencanaan Strategik (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja serta reuiu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Setda Prov.Kaltim tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk tahun 2015 dengan 15 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 19 buah. Adapun capaian kinerja dari seluruh sasaran dan indikator kinerja adalah 91.20% dengan interpretasi "BAIK", Sedangkan Capaian Realisasi Anggaran dari pelaksanaan program tersebut sebesar Rp.217.700.013.117,50 atau sebesar 97,87% dari total anggaran sebesar Rp.5.868.360.904.266,80

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | vi |
| | |
| I PENDAHULUAN | |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| B. Aspek Strategis Organisasi | 2 |
| C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) | 3 |
| D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| E. Struktur Organisasi | 6 |
| F. Sumber Daya Manusia | 12 |
| | |
| II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 17 |
| 1. Visi | 18 |
| 2. Misi | 21 |
| 3. Tujuan | 22 |
| 4. Sasaran | 26 |
| 5. Indikator Kinerja | 29 |
| 6. Strategi | 31 |
| 7. Kebijakan | 32 |
| 8. Program | 34 |
| B. Rencana Kinerja Tahunan | 38 |
| C. Perjanjian Kinerja | 40 |
| | |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 43 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 46 |
| C. Realisasi Anggaran | 72 |
| | |
| IV PENUTUP | 75 |
| | |
| Lampiran-Lampiran | |
| Perjanjian Kinerja | |
| Lain-lain yang dianggap perlu | |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 | Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim Menurut Pendidikan Tahun 2015 | 13 |
| Tabel 1.2 | Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim menurut Golongan Tahun 2015 | 14 |
| Tabel 1.3 | Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Menurut Struktural dan Non Struktural Tahun 2015 | 15 |
| Tabel 1.4 | Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim yang tersusun dengan Kriteria Gender | 16 |
| Tabel 2.1 | Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 24 |
| Tabel 2.2 | Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis | 28 |
| Tabel 2.3 | Penentuan Indikator Kinerja Sasaran | 30 |
| Tabel 2.4 | Progam untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 | 36 |
| Tabel 2.5 | Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 | 38 |
| Tabel 2.6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2015 | 41 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015 | 44 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 | 44 |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Kinerja Sasaran Tersusunnya LPPD | 46 |
| Tabel 3.4 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 49 |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.5 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 51 |
| Tabel 3.6 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 53 |
| Tabel 3.7 | Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kerjasama antar daerah | 54 |
| Tabel 3.8 | Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 56 |
| Tabel 3.9 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | 58 |
| Tabel 3.10 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 59 |
| Tabel 3.11 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 61 |
| Tabel 3.12 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 63 |
| Tabel 3.13 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | 65 |
| Tabel 3.14 | Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 70 |
| Tabel 3.15 | Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 | 71 |
| Tabel 3.16 | Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2015 | 72 |
| Tabel 3.17 | Alokasi Anggaran Sasaran dan program Tahun 2015 | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Instansi di bawahnya | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk, dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “HEMAT STRUKTUR DAN

KAYA FUNGSI “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008.

B. Aspek Strategis Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan

dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Sekretariat Daerah akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Sekretariat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Sekretariat Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

C. Permasalahan utama (Isu Strategis).

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Gubernur serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, maka Isu-Isu strategis di lingkungan Sekretariat Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Sering tidak terpenuhinya persyaratan dan rekomendasi permohonan ijin keluar negeri Pejabat Negara dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
2. Belum tersedianya data base kependudukan yang akurat sebagai pedoman dan acuan guna penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap meliputi kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan akta kematian serta dokumen kependudukan lainnya;
4. Dalam rangka Otonomi Daerah, pemerintah pusat tidak sepenuhnya melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah;
5. Belum fokusnya bagian Bankum dalam menangani sengketa karena tidak adanya bidang tugas yang khusus menangani hal tersebut;
6. Sistem jaringan informasi Hukum belum maksimal difungsikan;
7. Tuntutan masyarakat makin tinggi untuk mencari keadilan dan penyelesaian Hukum ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Perlunya penanganan penyelesaian batas administrasi wilayah;
9. Perlunya pelaksanaan sistem koordinasi dalam penanganan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan antar provinsi;
10. Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
11. Perlunya Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri;
12. Optimalisasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin;
13. Masih tingginya nilai inflasi daerah;
14. Makin banyaknya organisasi kemasyarakatan penerima hibah dan bantuan sosial;
15. Perlunya koordinasi di bidang Kesejahteraan rakyat;

16. Perlunya pelayanan yang maksimal di bidang kehumasan dan keprotokolan;
17. Perlu revisi PP 41 Tahun 2007;
18. Ditetapkannya target SPM dalam RPJMD;
19. Tuntutan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparan;
20. Pentingnya penerapan Anjab dan ABK dalam penyusunan standar kompetensi;
21. Perlunya peningkatan disiplin Aparatur;
22. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang akuntabel;
23. Diperlukan sistem aplikasi administrasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
24. Pelaksanaan sistem Manajemen Tata Kelola Barang Milik Daerah;
25. Tertib Penataan Administrasi Umum di Sekretariat Daerah;
26. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendukung di lingkungan Sekretariat Daerah.

D. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tatalaksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

■ Sekretaris Daerah

1. Staf Ahli

- a. Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan.
- b. Bidang Pertanian Sumber Dayan Alam dan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pembangunan.
- d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

2. Asisten Pemerintahan

a. Biro Pemerintahan Umum

- 1) Bagian Pemilu dan Pejabat Negara
 - a) Sub Bagian Pemilu;
 - b) Sub Bagian Pejabat Negara;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Bagian Urusan Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Penerimaan Daerah;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Administrasi Pemerintahan
- a) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 4) Bagian Kependudukan
- a) Sub Bagian Administrasi dan Data Kependudukan;
 - b) Sub Bagian Pencatatan Sipil dan Pengembangan Penduduk.

b. Biro Hukum

- 1) Bagian Peraturan Perundang-undangan
- a) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.
- 2) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)
- a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Hak Azasi Manusia (HAM);
 - c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
- 3) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah I;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah II;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 4) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
- a) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Jaringan Informasi Hukum.

c. Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama

- 1) Bagian Perbatasan
- a) Sub Bagian Batas Antar Daerah dan Antar Negara;
 - b) Sub Bagian Pemetaan.

- 2) Bagian Penataan Wilayah.
 - a) Sub Bagian Pengembangan Wilayah;
 - b) Sub Bagian Toponimi;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3) Bagian Kerjasama.
 - a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

a. Biro Pembangunan Daerah.

- 1) Bagian Perencanaan Program Setda.
 - a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Setda;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Sumber Daya Alam dan Wilayah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Kabupaten/Kota.
- 3) Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.
 - a) Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan.

b. Biro Perekonomian

- 1) Bagian Sarana Perekonomian
 - a) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;
 - b) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Industri dan Jasa.

- a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
- 3) Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam.
 - a) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - c) Sub Bagian Pertambangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat.

a. Biro Sosial

- 1) Bagian Kesehatan, Mental dan Spiritual.
 - a) Sub Bagian Keagamaan
 - b) Sub Bagian Kesehatan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 2) Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya
 - a) Sub Bagian Pendidikan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Seni dan Budaya.
- 3) Bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan.
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Kemasyarakatan.

b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- 1) Bagian Kehumasan.
 - a) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal;
 - b) Sub Bagian Perpustakaan Setda.
- 2) Bagian Protokol.
 - a) Sub Bagian Penerimaan Tamu Pemda;
 - b) Sub Bagian Upacara dan Perjalanan Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

5. Asisten Administrasi Umum.

a. Biro Organisasi

- 1) Bagian Kelembagaan
 - a) Sub Bagian Standar dan Desain Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan.
- 2) Bagian Ketatalaksanaan
 - a) Sub Bagian Mekanisme dan Prosedur Kerja;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3) Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 - a) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian Setda.
- 4) Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - a) Sub Bagian Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b). Sub Bagian Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.

b. Biro Keuangan

- 1) Bagian Anggaran
 - a) Sub Bagian Anggaran I;
 - b) Sub Bagian Anggaran II;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Perbendaharaan.
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan I;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan II;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan III;
 - d) Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah.
- 3) Bagian Akuntansi.
 - a) Sub Bagian Akuntansi Belanja;

- b) Sub Bagian Akuntansi Pendapatan;
- c) Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4) Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah.
 - a) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah.

c. Biro Perlengkapan

- 1) Bagian Analisis Kebutuhan.
 - a) Sub Bagian Analisis dan Standarisasi Barang / Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Pengendalian Aset Daerah.
 - a) Sub Bagian Pengamanan Barang Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah.
- 3) Bagian Pengelolaan Aset Daerah.
 - a) Sub Bagian Inventarisasi dan Distribusi;
 - b) Sub Bagian Penilaian dan Penghapusan Barang;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Biro Umum.

- 1) Bagian Administrasi Umum.
 - a) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi.
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2) Bagian Keuangan Setda.
 - a) Sub Bagian Belanja dan Perjalanan Dinas Pegawai;
 - b) Sub Bagian Belanja Lain-Lain;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Rumah Tangga.
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Urusan Dalam;

- c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Sarana.
- 4) Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Sarana Telekomunikasi;
 - b) Sub Bagian Sandi.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran.

E. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering :

1. Pendidikan

Sampai dengan Per 31 Desember Maret 2015 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 546 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim dari 536 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan Kedua dengan jumlah 215 orang urutan pertama adalah pendidikan SLTA yaitu sebanyak 173 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 78 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim mulai tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1

SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2015
Keadaan Per 31 Desember 2015

| NO | EKSEKUTIF/BIRO | TAHUN 2015 | | | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------|------|----|--------|
| | | S.3 | S.2 | S.1 | SM | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | SEKDA & ASISTEN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | STAF AHLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | PEMERINTAHAN UMUM | 0 | 10 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 39 |
| 4 | HUKUM | 0 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | PEREKONOMIAN | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | SOSIAL | 0 | 10 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 | 38 |
| 9 | HUMAS & PROTOKOL | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | ORGANISASI | 0 | 6 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | KEUANGAN | 0 | 6 | 35 | 6 | 35 | 1 | 0 | 83 |
| 12 | PERLENGKAPAN | 0 | 8 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | UMUM | 0 | 4 | 42 | 9 | 65 | 8 | 26 | 154 |
| Jumlah | | 5 | 78 | 215 | 28 | 173 | 10 | 27 | 536 |

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

2. Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan Per 31 Maret 2015 PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim yang memiliki golongan III sebanyak 299 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 149 orang, golongan IV sebanyak 75 orang dan golongan I sebanyak 23 orang.

Tabel 1.2

SUMBER DAYA APARATUR
SETDA PROVINSI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015
Keadaan Per 31 Maret 2015

| NO | EKSEKUTIF/BIRO | JUMLAH GOL PNS THN 2015 | | | | Jumlah |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|----|--------|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | SEKDA & ASISTEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | STAF AHLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | PEMERINTAHAN UMUM | 7 | 22 | 10 | 1 | 40 |
| 4 | HUKUM | 6 | 24 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA | 5 | 19 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | PEMBANGUNAN DAERAH | 4 | 21 | 3 | 0 | 28 |
| 7 | PEREKONOMIAN | 7 | 19 | 7 | 0 | 33 |
| 8 | SOSIAL | 7 | 27 | 5 | 0 | 39 |
| 9 | HUMAS & PROTOKOL | 4 | 15 | 12 | 0 | 31 |
| 10 | ORGANISASI | 4 | 17 | 7 | 0 | 28 |
| 11 | KEUANGAN | 8 | 54 | 20 | 2 | 84 |
| 12 | PERLENGKAPAN | 7 | 22 | 5 | 0 | 34 |
| 13 | UMUM | 7 | 59 | 73 | 20 | 159 |
| Jumlah | | 75 | 299 | 149 | 23 | 546 |

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

Berdasarkan Per 31 Desember 2015 Jumlah Eselon Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 94 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon I sampai dengan IV Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Setda Provinsi Kaltim berdasarkan Eselon :

Tabel 1.3

SUMBER DAYA APARATUR
SETDA PROVINSI MENURUT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL TAHUN 2015
Keadaan per 31 Desember 2015

| NO | EKSEKUTIF/BIRO | JUMLAH THN 2013 | | | | | Pelaksana | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| | | Eselon I.B | Eselon II.A | Eselon II.B | Eselon III.A | Eselon IV.A | | |
| 1 | SEKDA | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | ASISTEN | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 2 | STAF AHLI | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 3 | PEMERINTAHAN UMUM | - | - | 1 | 4 | 10 | 24 | 39 |
| 4 | HUKUM | - | - | 1 | 4 | 10 | 18 | 33 |
| 5 | PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA | - | - | 1 | 3 | 6 | 16 | 26 |
| 6 | PEMBANGUNAN DAERAH | - | - | 1 | 3 | 7 | 17 | 28 |
| 7 | PEREKONOMIAN | - | - | 1 | 3 | 8 | 19 | 31 |
| 8 | SOSIAL | - | - | 1 | 3 | 7 | 27 | 38 |
| 9 | HUMAS & PROTOKOL | - | - | 1 | 2 | 5 | 23 | 31 |
| 10 | ORGANISASI | - | - | 1 | 3 | 10 | 15 | 29 |
| 11 | KEUANGAN | - | - | 1 | 3 | 12 | 67 | 83 |
| 12 | PERLENGKAPAN | - | - | 1 | 3 | 8 | 22 | 34 |
| 13 | UMUM | - | - | 1 | 4 | 11 | 138 | 154 |
| Jumlah | | 1 | 9 | 11 | 35 | 94 | 386 | 536 |

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.4

SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM
 YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER TAHUN 2015
 Keadaan Per 31 Desember 2015

| NO. | EKSEKUTIF/BIRO | Tahun 2015 | | |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | SEKDA & ASISTEN | 4 | 1 | 5 |
| 2 | STAF AHLI | 4 | 1 | 5 |
| 3 | PEMERINTAHAN UMUM | 27 | 12 | 39 |
| 4 | HUKUM | 17 | 16 | 33 |
| 5 | PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA | 15 | 11 | 26 |
| 6 | PEMBANGUNAN DAERAH | 18 | 10 | 28 |
| 7 | PEREKONOMIAN | 21 | 10 | 31 |
| 8 | SOSIAL | 24 | 14 | 38 |
| 9 | HUMAS & PROTOKOL | 23 | 8 | 31 |
| 10 | ORGANISASI | 19 | 10 | 29 |
| 11 | KEUANGAN | 51 | 32 | 83 |
| 12 | PERLENGKAPAN | 28 | 6 | 34 |
| 13 | UMUM | 120 | 34 | 154 |
| Jumlah | | 371 | 165 | 536 |

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam kontek kehidupan bernegaraa, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahahn lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang ditandai dengan adanya keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut. Upaya ini perlu dibangun dengan komitmen yang kuat terutama dari kalangan pemerintah menuju reformasi administrasi publik untuk menciptakan organisasi yang lebih mengedepankan fungsi pengendalian/pembuat kebijakan (*steering*) dari pada fungsi pelaksanaan (*rowing*).

Perlu juga disadari bahwa upaya reformasi kelembagaan, merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan. Artinya, keberhasilan dalam menata kelembagaan perangkat daerah sangat tergantung pada keberhasilan aspek lain seperti penataan sistem kepegawaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

1. Visi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Memasuki era otonomi daerah semangat reformasi masih terasa dan menyentuh seluruh sendi kehidupan yang bermuara kepada semangat untuk meninggalkan sistem lama yang tidak transparan menuju Pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, transparan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memotivasi tumbuh dan berkembangnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat didalam penyelenggaraan berbagai aktivitasnya. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat berperan optimal dan terarah dalam mendorong Pemerintahan yang lebih mampu mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan daerah.

Meningkatnya persaingan di era perdagangan bebas, tuntutan pemberdayaan masyarakat dan daerah melalui pelayanan prima merupakan kondisi yang sangat di sadari oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar lebih unggul, dan lebih maju, serta senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Sekretaris Daerah selaku unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah disamping fungsinya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Mengingat besarnya beban tugas dan tanggung jawab seorang Sekretaris Daerah dalam melaksanakan proses administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih terhadap pemberian pelayanan kepada seluruh perangkat daerah, maka sudah barang tentu perlu didukung oleh staf yang profesional.

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi kekuatan eksternal yang terjadi diluar Sekretariat Daerah Provinsi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perubahan dan tuntutan kinerja internal adalah :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Pedoman pelaksanaan otonomi daerah belum memadai
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi pemerintahan daerah
4. Sering terjadinya situasi yang kurang kondusif

Tuntutan perubahan tersebut akan terjadi terus menerus, yang mengandung konsekuensi adanya upaya untuk terus melakukan tindakan-tindakan ke arah perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep, dan disusun dalam tahapan yang terencana, dihayati dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaatnya.

Untuk mendukung pencapaian maksud tersebut diatas perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh ke depan seluruh Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kalimantan Timur ke arah tujuan yang akan dicapai.

Bertolak dari kondisi diatas, maka tugas di jajaran Sekretariat Daerah Kalimantan Timur kedepan semakin berat dan kompleks, sehingga

memerlukan adanya upaya-upaya bertahap, terencana, dan konsisten dalam mengoptimalkan pemanfaatan segala Sumber Daya, mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dalam kemajuan jaman maka Sekretariat Daerah menetapkan visi sebagai berikut :

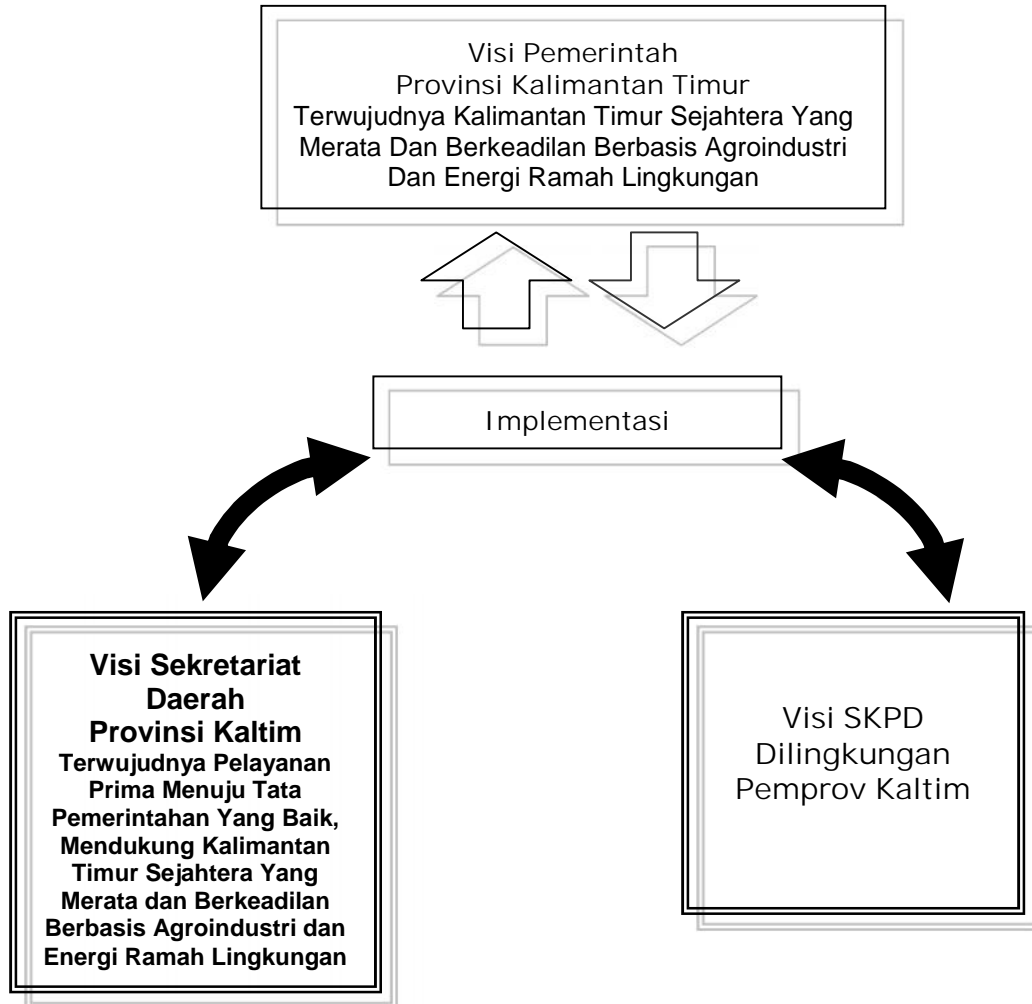
Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Mendukung Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

Upaya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat dari pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum yang prima oleh Sekretariat Daerah yang tentunya sangat berharga dalam percepatan pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Instansi di bawahnya



2. Misi

Kemampuan organisasi untuk membuat uraian kegiatan secara akurat menggambarkan lingkup pekerjaan yang dimasuki, memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan produk pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan semua *stakeholders*, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin.

Adapun Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama** secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan ;
2. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang pembangunan daerah dan perekonomian** yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ;
3. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol** yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ;
4. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum** secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Setda Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Misi Pertama " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik ;
 - (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama.
2. Misi Kedua " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan perekonomian yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ", dengan tujuan :
- (1) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel ;
 - (2) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Misi Ketiga " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ", dengan tujuan :
- (1) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat ;
 - (2) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
4. Misi Keempat " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan

umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik ;
- (2) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel ;
- (3) Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- (4) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

Upaya perwujudan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2013-2018 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi dan Tujuan Penyelenggaraan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

| Misi | | Tujuan | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan | 1 | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik |
| | | 2 | Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat |
| | | 3 | Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama. |
| 2 | Mewujudkan perumusan | 4 | Mewujudkan pelayanan |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan perekonomian yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan | | administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel |
| | | 5 | Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. |
| 3 | Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik | 6 | Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat |
| | | 7 | Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur. |
| 4 | Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel | 8 | Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik |
| | | 9 | Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel |
| | | 10 | Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah |
| | | 11 | Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur. |

4. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan Strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan fokus Sasaran dalam periode tahun 2013-2018 yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada sebagai berikut :

- (1) Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
 - a. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. Terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan NIK Nasional ;
- (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM ;
 - b. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur / masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM ;
- (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama, sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya kerjasama antar daerah ;

- b. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kabupaten/kota dan provinsi ;
- (4) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap ;
 - b. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP ;
- (5) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian ;
- (6) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat ;
- (7) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas ;
 - b. Terwujudnya kualitas pelayanan keprotokolan ;
- (8) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel ;
- (9) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas ;

- (10) Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sasarannya adalah :
- a. Terpenuhinya kebutuhan asset ;
- (11) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur, sasarannya adalah :
- a. Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum

Tabel 2.2

Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis

| Tujuan | | Sasaran Strategis | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik | 1 | Tersusunnya LPPD |
| | | 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional |
| 2 | Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM |
| | | 4 | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM |
| 3 | Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama | 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah |
| | | 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi |
| 4 | Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. | 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap |
| | | 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP |
| 5 | Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang | 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah | | |
| 6 | Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 10 | Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat |
| 7 | Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim | 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas |
| 8 | Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik | 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel |
| 9 | Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan Akuntabel. | 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas |
| 10 | Mewujudkan tatakelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. | 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset |
| 11 | Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan | 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum |

5. Indikator Kinerja.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Penentuan Indikator Kinerja Sasaran

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tersusunnya LPPD | 1 | Predikat LPPD |
| 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 2 | Jumlah pemerintah Kabupaten / Kota yang administrasi kependudukannya baik |
| 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 3 | Jumlah produk hukum yang ditetapkan |
| 4 | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | 4 | Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum |
| 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 5 | Jumlah perjanjian kerjasama (MOU) |
| 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 6 | Jumlah Penegasan Titik Batas |
| 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran pembangunan secara mantap | 7 | prosentase Capaian Hasil Pembangunan |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 8 | Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE |
| | | 9 | Berkurangnya jumlah pengaduan lelang |
| 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 10 | Nilai inflasi daerah |
| 10 | Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 11 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan |
| 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | 12 | Prosentase penurunan berita negatif |
| 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur | | Persentase indikator IKM yang diterapkan : |
| | | 13 | SKPD |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| | yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | 14 | Kab / Kota |
| | | 15 | Skor IKM rata2 unit pelayanan |
| | | 16 | % skpd dan kab/kota yang telah dievaluasi SOTK |
| | | 17 | % skpd yang melakukan analisis beban kerja |
| | | 18 | % skpd yang dinilai akuntabel (CC |
| 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 19 | Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | 20 | Prosentase aset yang masuk neraca daerah |
| 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum | 21 | Hasil Survey kepuasan |

6. Strategi

Untuk menentukan strategi yang diterapkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2013-2018 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan adanya faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Strategi kunci untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
2. Menerapkan e_government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ;
3. Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tepat dan potensial ;

5. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas ;
6. Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah ;
7. Meningkatkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan ;
8. Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri ;
9. Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah ;
10. Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif ;
11. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan ;
12. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya Kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
13. Penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (POLA KISS) ;
14. Penataan dan Pendayagunaan Sumber daya Aparatur.
15. Peningkatan Standar Pelayanan ;
16. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ;
17. Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik ;
18. Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi/Kab/Kota ;
19. Penerapan SIMBADA secara efektif dan efisien ;
20. Meningkatkan penataan administrasi umum.

7. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan misi dan visi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud di atas meliputi :

1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan urusan pemerintahan ;
2. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengacu pada pelaksanaan SIAK dan NIK Nasional.
3. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya azas kepastian hukum ;
4. Meningkatkan akurasi dan koordinasi data survey sebagai bahan pengembangan data dan informasi batas wilayah, penataan daerah dan kerjasama yang komprehensif.
5. Penyelenggaraan sistem pembinaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terencana, terkoordinir dan komprehensif ;
6. Peningkatan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.
7. Melakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
8. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat secara intensif.
9. Peningkatan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dalam akses penyediaan informasi publik
10. Peningkatan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) ;
11. Penerapan ketatalaksanaan yang transparan ;
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan ;
13. Peningkatan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) ;

14. Pengembangan dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
15. Menyediakan sistem dan informasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
16. Melakukan koordinasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
17. Peningkatan penerapan SIMBADA ;
18. Peningkatan standar pelayanan administrasi umum.

8. Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan yaitu :

1. Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
5. Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi
6. Program Bantuan Hukum dan HAM
7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
9. Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
10. Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan
11. Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
13. Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

15. Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan
16. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
17. Program Peningkatan Pelayanan Publik
18. Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
19. Program Penataan Organisasi
20. Program Penataan Pendayagunaan Aparatur
21. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
22. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Program Peningkatan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
28. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
33. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
34. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4

Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015

| Sasaran Strategis | | Program |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tersusunnya LPPD | Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah |
| 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | Program Penataan Administrasi Kependudukan |
| 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
| | | Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi |
| 4 | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | Program Bantuan Hukum dan HAM |
| 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah |
| 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | Program Penataan Daerah Otonomi Baru |
| 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan |
| 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) |
| 10 | Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
| | | Program Peningkatan Pelayanan |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat |
| | | | Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | | Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan |
| | | | Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan |
| 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | | Program Peningkatan Pelayanan Publik |
| | | | Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik |
| | | | Program Penataan Organisasi |
| | | | Program Penataan Pendayagunaan Aparatur |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja |
| 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi Umum | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
| | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. |

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja (Renja) di Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2015 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

| | Tujuan | | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik | 1 | Tersusunnya LPPD | 1 | Predikat LPPD | - | Tinggi |
| | | 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 2 | Jumlah pemerintah Kabupaten / Kota yang administrasi kependudukannya baik | Kab/Kota | 4 Kab/ 3 Kota |
| 2 | Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 3 | Jumlah produk hukum yang ditetapkan | Dok. | 1.077 |
| | | 4 | Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | 4 | Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum | Kasus | 8 |
| 3 | Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama | 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 5 | Jumlah perjanjian kerjasama (MOU) | MoU | 86 |
| | | 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 6 | Jumlah Penegasan Titik Batas | PBU | 5 |
| 4 | Mewujudkan | 7 | Terwujudnya pelayanan | 7 | Prosentase Capaian | % | 90 |

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----|
| | <p>pelaksanaan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.</p> | <p>administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap</p> | <p>Hasil Pembangunan</p> | | | | |
| | | 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 8 | Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE | Lelang | 949 |
| | | | | 9 | Berkurangnya jumlah pengaduan lelang | % | 5 |
| 5 | Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah | 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 10 | Nilai inflasi daerah | % | 5,5 |
| 6 | Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 10 | Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 11 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | % | 6 |
| 7 | Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim | 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | 12 | Prosentase penurunan berita negatif | | |
| 8 | Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik | 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | | Persentase indikator IKM yang diterapkan : | | |
| | | | | 13 | SKPD | % | 30 |
| | | | | 14 | Kab / Kota | % | 30 |
| | | | | 15 | Skor IKM rata2 unit pelayanan | % | 75 |
| | | | | | % skpd dan kab/kota yang telah dievaluasi SOTK | | |
| | | | | 16 | SKPD | % | 100 |
| | | | | 17 | Kab / Kota | % | 100 |
| | | | | 18 | % skpd yang melakukan analisis beban kerja | % | 100 |
| | | | | 19 | % skpd yang dinilai akuntabel (CC | % | 85 |
| 9 | Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan Akuntabel. | 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 20 | Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK | Opini | WTP |
| 10 | Mewujudkan tatakelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan | 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | 21 | Prosentase aset yang masuk neraca daerah | - | - |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------|---|---|
| | transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. | | | | | | |
| 11 | Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum | 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum | 22 | Hasil Survey kepuasan | - | - |

C. Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk tahun 2015 ditetapkan sebanyak 15 Sasaran dengan 22. indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tersusunnya LPPD | 1 Predikat LPPD | - | Tinggi |
| 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 2 Jumlah pemerintah Kabupaten / Kota yang administrasi kependudukannya baik | Kab/Kota | 4 Kab/ 3 Kota |
| 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan | Dok. | 1.077 |
| 4 | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | 4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum | Kasus | 8 |
| 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 5 Jumlah perjanjian kerjasama (MOU) | MoU | 86 |
| 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 6 Jumlah Penegasan Titik Batas | PBU | 5 |
| 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | 7 prosentase Capaian Hasil Pembangunan | % | 90 |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 8 Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE | Lelang | 949 |
| | | 9 Berkurangnya jumlah pengaduan lelang | % | 5 |
| 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 10 Nilai inflasi daerah | % | 5,5 |
| 10 | Terwujudnya Kualitas Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 11 MenurunnyaTingkat Kemiskinan | % | 6 |
| 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | 12 Prosentase penurunan berita negatif | - | - |
| 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | Persentase indikator IKM yang diterapkan : | | |
| | | 13 SKPD | % | 30 |
| | | 14 Kab / Kota | % | 30 |
| | | 15 Skor IKM rata2 unit pelayanan | % | 75 |
| | | % skpd dan kab/kota yang telah dievaluasi SOTK | | |

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov.KaltimTahun 2015

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| | | 16 SKPD | % | 100 |
| | | 17 Kab / Kota | % | 100 |
| | | 18 % skpd yang melakukan analisis beban kerja | % | 100 |
| | | 19 % skpd yang dinilai akuntabel (CC | % | 85 |
| 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 20 Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK | Opini | WTP |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | 21 Prosentase aset yang masuk neraca daerah | - | - |
| 15 | Terwujudnya pengelolaan administrasi Umum | 22 Hasil Survey kepuasan | - | - |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|------|-----------------|------------------|
| 4 | Lebih dari 100% | Sangat baik |
| 3 | 75% sampai 100% | Baik |
| 2 | 55% sampai 75% | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55% | Kurang |

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

| No. | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-----|-----------------|------------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Kurang |
| 2 | 75% sampai 100% | Cukup |
| 3 | 55% sampai 75% | Baik |
| 4 | Kurang dari 55% | Sangat baik |

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Adapun Indikator Kinerja Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Tersusunnya LPPD | 1 Predikat LPPD | Predikat | Tinggi | Tinggi | 100 |
| 2 | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 2 Jumlah pemerintah Kabupaten / Kota yang administrasi kependudukannya baik | Kab/Kota | 4 Kab/3 Kota | 4 Kab/3 Kota | 100 |
| 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan | Dok. | 1.077 | 917 | 85,14 |
| 4 | Terwujudnya bantuan | 4 Prosentase | Kasus | 8 | 8 | 100 |

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | hukum, dan aparaturnya / masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | | penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum | | | | |
| 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 5 | Jumlah perjanjian kerjasama (MOU) | MoU | 86 | 43 | 50 |
| 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 6 | Jumlah Penegasan Titik Batas | PBU | 5 | 5 | 100 |
| 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | 7 | Prosentase Capaian Hasil Pembangunan | % | 90 | 90 | 100 |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 8 | Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE | Lelang | 949 | 949 | 100 |
| | | 9 | Berkurangnya jumlah pengaduan lelang | % | 5 | 1 | 20 |
| 9 | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 10 | Nilai inflasi daerah | % | 5,5 | 0,70 | 100 |
| 10 | Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 11 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | % | 6 | 6,42 | 93,46 |
| 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | 12 | Prosentase penurunan berita negatif | | | | |
| 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparaturnya yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | | Persentase indikator IKM yang diterapkan : | | | | |
| | | 13 | SKPD | % | 30 | 100 | 333 |
| | | 14 | Kab / Kota | % | 30 | 30 | 100 |
| | | 15 | Skor IKM rata2 unit pelayanan | % | 75 | 72,32 | 96,43 |
| | | | % skpd dan kab/kota yang telah dievaluasi SOTK | | | | |
| | | 16 | SKPD | % | 100 | 100 | 100 |
| | | 17 | Kab / Kota | % | 100 | 90 | 90 |
| | | 18 | % skpd yang melakukan analisis beban kerja | % | 100 | 98 | 98 |
| 19 | % skpd yang dinilai akuntabel (CC) | % | 85 | 83,33 | 98,04 | | |
| 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 20 | Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK | Opini | WTP | WDP | 75 |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | 21 | Prosentase aset yang masuk neraca daerah | | | | |
| 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum | 22 | Hasil survey kepuasan | % | - | - | - |

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Insntasi Pemerintah

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

- I. Tujuan Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

| Tujuan 1 | Sasaran |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik | 1 Tersusunnya LPPD |
| | 2 Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional |

1. Sasaran Tersusunnya LPPD

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Tersusunnya LPPD

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 1 | Predikat LPPD | Tinggi | Tinggi | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Sasaran Tersusunnya LPPD pada tahun 2015, tergolong Baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja, yang capaiannya tergolong Baik. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Indikator Predikat Kineja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi Tinggi dan sangat tinggi target capaian akhir RPJMD tahun 2018.

Indikator presentase meningkatnya kualitas LPPD dengan kegiatan menetapkan target kinerja sebesar 100%. Terkait penyusunan LPPD, ILPPD Tahun 2015 permasalahannya dalam hal penghimpunan data yaitu terlambatnya data yang diterima dari Kab/Kota dan Provinsi serta belum lengkapnya data pendukung yang disampaikan oleh SKPD. Dari hal tersebut tindak lanjut Tahun 2015 penghimpunan data ke Kabupaten/Kota dilaksanakan sebelum waktu penyampaian laporan yang ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Permasalahan

1. SKPD terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola sehingga penyusunan LPPD Provinsi terhambat.
2. Kabupaten/Kota juga terlambat menyampaikan data pendukung untuk penyusunan LPPD Provinsi Kaltim .

3. Data yang dimaksud tersebut di atas harus disertai data pendukung yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena sangat penting untuk mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 3 form isian.
4. Aspek Tingkat Capaian Kinerja untuk IKK Provinsi sangat penting karena memiliki bobot penilaian yang paling tinggi dan dukungan data SKPD dan kabupaten/kota harus benar.

Solusi :

1. Meminta kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Program/Kegiatan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya.
2. Penyampaian data SKPD harus disertai data pendukung yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Penyampaian data kabupaten/kota harus disertai data pendukung yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Pejabat/ staf yang ditunjuk oleh SKPD yang menangani data untuk penyusunan LPPD Provinsi harus memiliki kompetensi yang bagus dan juga mengetahui dengan jelas data pendukung yang dimaksud.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tersusunnya LPPD pada tahun 2015 adalah:

Program Penataan dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah, adapun kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2 | Jumlah pemerintah Kabupaten / Kota yang administrasi kependudukannya baik | 4 Kab/3 Kota | 4 Kab/3 Kota | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional Sekretariat Daerah Provsinsi Kaliaatmam Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalamantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Sasaran Terselenggaranya Sistem Administrasi Kependudukan dengan IKU jumlah pemerintah kabupaten/kota yang administrasi kependudukannya baik, permasalahan terjadinya pemekaran wilayah pada kabupaten Kutai Barat yaitu kabupaten Mahakam Ulu akan tetapi kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan akhir Tahun 2015 belum memiliki kode wilayah sehingga belum dapat melakukan pelayanan dan data penduduknya masih menjadi satu dengan kabupaten Kutai Barat, dari hal tersebut tindak lanjut Tahun 2015 :

1. Meminta kepada Kemendagri untuk memberikan kode wilayah sehingga kabupaten Mahakam Ulu dapat segera melakukan pelayanan.
2. Meminta kepada Ditjen Adminduk untuk menyiapkan peralatan dan jaringan kepada pemerintah kabupaten Mahulu sehingga masyarakat di Kabupaten Mahulu dapat segera terlayani administrasi kependudukannya.

Permasalahan

Terjadinya pemekaran wilayah pada kabupaten Kutai Barat yaitu kabupaten Mahakam Ulu dimana sampai dengan akhir tahun 2015 belum dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan karena belum memiliki peralatan dan jaringan komunikasi data (jarkomdal) yang memadai walaupun telah memiliki kode wilayah sendiri yang terpisah dari Kabupaten Kutai Barat

Solusi

Meminta kepada Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah untuk segera menyiapkan jaringan dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional Tahun 2015 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan

II. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 2 | Sasaran |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM |
| | 4 Terwujudnya bantuan hukum,dan aparaturnya masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM |

3. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------|
| 3 | Jumlah produk hukum yang ditetapkan | 1.077 | 917 | 85,14 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM Sekretariat Daerah Provsinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya

Pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan 2015 secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan

1. Kurangnya perhatian SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mendukung Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan menyampaikan Rencana Peraturan Daerah kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim;
2. Sering berubah-ubahnya draft Keputusan Gubernur oleh pengusul keputusan, sehingga proses penetapan Keputusan Gubernur menjadi relatif lama dan juga harus melewati proses paraf dari Kepala Biro Hukum hingga Sekretaris Daerah Prov.Kaltim;

3. Proses evaluasi / klarifikasi Raperda / Perda oleh Pemerintah Pusat masih terlalu lama;
4. Proses pembahasan Raperda oleh DPRD Prov. Kaltim masih terlalu lama.

Solusi

1. Seluruh Kepala SKPD agar menyampaikan Prolegda setiap tahun terutama Perda kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim untuk dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur setiap tahun;
2. Dalam penyusunan draft Keputusan Gubernur terkait dengan substansi keputusan tersebut agar lebih teliti dan lebih ditingkatkan untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim;
3. Selalu melakukan komunikasi/koordinasi secara langsung dengan Pemerintah Pusat (Departemen terkait).
4. Selalu melakukan komunikasi/koordinasi secara langsung dengan DPRD Prov. Kaltim.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM Tahun 2015 adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)
3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------|
| 4 | Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum | 8 | 8 | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

1. Koordinasi untuk mencari bukti / surat tertulis dengan instansi / tergugat untuk dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sering terkendala karena bukti sudah tidak ada / hilang;
2. Perda dan Peraturan Bupati / Walikota masih jarang disampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim untuk dievaluasi dan diklarifikasi;

Solusi :

1. Instansi / tergugat agar menyimpan / mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum / perkara, dan menyerahkannya ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim;
2. Seluruh Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur cq. Biro Hukum untuk diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya, dan tidak menghambat iklim investasi / biaya ekonomi tinggi;

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM Tahun 2014 adalah Program Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Tujuan Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 3 | Sasaran |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama | 5 Meningkatnya kerjasama antar daerah |
| | 6 Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi |

5. Meningkatnya kerjasama antar daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kerjasama antar daerah

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 5 | Jumlah perjanjian kerjasama (MOU) | 86 | 43 | 50 | Cukup |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya kerjasama antar daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong cukup. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang tidak melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan

kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama antar Pemerintah Prov.Kaltim dengan Pemerintah Kab/Kota
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang perjanjian kerjasama di tingkat Kabupaten/ kota dan dengan instansi vertikal.

Solusi :

1. Terus melakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap perjanjian kerjasama yang belum ada tindak lanjutnya atau belum optimal dalam implementasinya.
2. Meningkatkan inisiasi dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama.

Keberhasilan :

Telah dilaksanakannya kerjasama sister province dan sister city dengan beberapa negara di tahun 2015, seperti dengan Schyccelles.

Inovasi :

Meningkatkan pengembangan kerjasama tidak hanya di bidang yang telah dikerjasamakan, juga dengan melibatkan pihak ketiga untuk upaya perluasan bidang kerjasama sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kaltim

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Meningkatnya kerjasama antar daerah Tahun 2015 adalah Prog. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah

6. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 6 | Jumlah Penegasan Titik Batas | 5 | 5 | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatkan kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan

Masih adanya perbedaan persepsi penerapan Peraturan Pemerintah tentang penetapan batas wilayah dan tentang penarikan garis batas wilayah pada pelaksanaannya di lapangan oleh pemerintah kab/kota.

Solusi

1. Melakukan kegiatan rapat pembahasan permasalahan yang terjadi di lapangan, oleh Pem.Prov. Kaltim kepada Mendagri.
2. Melakukan klarifikasi titik batas dengan melakukan kunjungan atau ukur ulang di lapangan maupun secara kartometrik.

Keberhasilan :

Telah diterbitkannya Permendagri Nomor 46 tahun 2014 tentang penetapan batas wilayah Kab. Paser Prov. Kaltim dengan Kab. Balangan Prov. Kalsel.

Telah terealisasi usulan Permendagri yang melebihi target dari 5 usulan yang direncanakan telah teralisasi sebanyak 7, dan satu telah terbit berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri

Telah tersusunnya katalog / kronologis segmen batas yang terdiri dari 14 segmen batas antar kab/kota yang ada di Kalimantan Timur dan 4 segmen batas antar Provinsi yang berbatasan dengan Prov. Kaltim.

Terobosan :

Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik kepada Pemkab/kota dan sebaliknya;

Melakukan inovasi berdasarkan hasil evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja di tahun tahun berikutnya.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi Tahun 2015 adalah Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

IV. Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 4 | Sasaran |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah | 7 Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel | pembangunan secara mantap |
| | 8 Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP |

7. Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 7 | Prosentase Capaian Hasil Pembangunan | 90 | 90 | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.9, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi Sekretariat Daerah Provsinsi Kaliamantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kaliamantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan

Belum optimalnya informasi sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP) ;

Solusi

Perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap Tahun 2015 adalah Program pengendalian dan pelaporan pembangunan

8. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 8 | Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE | 949 | 949 | 100 | Baik |
| 9 | Berkurangnya jumlah pengaduan lelang | 5 | 1 | 20 | Sangat baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP Sekretariat Daerah Provsinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dengan kategori tergolong masing-masing baik dang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan

Belum meratanya pemahaman dan penguasaan Perundang-undangan serta Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik di tingkat Kelompok Kerja ataupun Pejabat berwenang

Solusi

Memperbanyak pelatihan /bimtek/ diklat/ seminar mengenai Perundang-undangan serta Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik di tingkat Kelompok Kerja ataupun Pejabat berwenang

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP Tahun 2015 adalah Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan

- V. Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 5 | Sasaran |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah | 9 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian |

9. Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 10 | Nilai inflasi daerah | 5,5 (+1%) | 5,5 (+ 0,70%) | 100 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.11, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Sekretariat Daerah Provsinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

A. Komoditas penyebab Inflasi di Kaltim diantaranya :

- Kenaikan harga dan kelangkaan BBM Jenis Premium dan Solar
- Meningkatnya ongkos trnsportasi dalam kota
- Kenaikan harga makanan jadi
- Kenaikan harga tarifDasar Listrik
- Meningkatnya biaya sewa rumah dan biayaperumahan.

B. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengamanan harga dan jalur distribusi di Kalimantan Timur saat ini yaitu :

- Produksi local yang terbatas dan beberapa komoditi tertentu tergantung pasokan dari luar daerah
- Dominannya pihak grosir dan pedagang Besar dalam menentukan harga.
- Jaringan distribusi yang belum efektif karena panjangnya mata rantai distribusi komoditi tertentu

- Faktor cuaca pada saat ini yang menyebabkan komunikasi dan transportasi keberbagai daerah terganggu, disamping itu ada beberapa daerah mengalami gagal panen pada kantong-kantong sentra produksi Inspraktuktur sebagai pendukung kelancaraan distribusi masih terbatas terutama dari dan atau kel bukota Provinsi, Kabupaten/Kota ,Kecamatan dan Desa – Desa bahkan sentra Produksi yang tersebar.

Solusi

Melakukan kordinasi dengan daerah pemasok Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terutama Komoditi pangan melalui distributor.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Tahun 2015 adalah Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

- VI. Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 6 | Sasaran |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat | 10 Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat |

- 10. Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|-------------------------------|--------|-----------|--------------|----------|
| 11 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | 6 | 6,42 | 93,46 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Sekretariat Daerah Provsinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Tidak terkecuali di Kalimantan Timur, penanggulangan kemiskinan juga merupakan prioritas pembangunan antara lain menurunkan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin bila dilihat dari proporsi penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal, secara umum proporsi penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan. Dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan hampir stabil sekitar 4 persen, sedangkan di daerah pedesaan menunjukkan trend yang menurun.

Pada tahun 2010 penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 4,02 persen dari total penduduk daerah perkotaan dan pada tahun 2015 sebesar 3,99 persen. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 253.600 ribu atau 6,42 persen.

Permasalahan

1. Permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan
2. Belum memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA, dan penyelenggaraan pemerintahan.
3. ketidakseimbangan potensi ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi

Solusi

1. Mengefektifkan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
2. Ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial
3. Memberdayakan penduduk miskin dengan upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Tahun 2015 adalah

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

VII. Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 7 | Sasaran |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim | 11 Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas |

VIII. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 8 | Sasaran |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik | 12 Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel |

12. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| | Persentase indikator IKM yang diterapkan : | | | | |
| 13 | SKPD | 30 | 100 | 333 | Baik |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|
| 14 | Kab / Kota | 30 | 30 | 100 | Baik |
| 15 | Skor IKM rata2 unit pelayanan | 75 | 72,32 | 96,43 | Baik |
| | % skpd dan kab/kota yang telah dievaluasi SOTK | | | | |
| 16 | SKPD | 100 | 100 | 100 | Baik |
| 17 | Kab / Kota | 100 | 90 | 90 | Baik |
| 18 | % skpd yang melakukan analisis beban kerja | 100 | 98 | 98 | Baik |
| 19 | % skpd yang dinilai akuntabel (CC | 85 | 83,33 | 98,04 | Baik |

Hasil Pengukuran pada tabel 3.13, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Analisis hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD/Unit Pelayanan Publik terkait, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Dari uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan IKM Tahun 2015 dilaksanakan pada 14 (empatbelas) unit pelayanan atau SKPD yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) rumpun SKPD yaitu :
 - a. Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
 - b. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
2. Dari hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan pada 14 (empatbelas) SKPD dimaksud, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hampir keseluruhan unit pelayanan masuk dalam kategori “BAIK” dan

Peningkatan Mutu Pelayanan menjadi sangat baik. Namun masih ada beberapa prioritas untuk dilakukan pembinaan terhadap peningkatan mutu pelayanan yang masih kurang.

3. Hasil pengukuran dari seluruh unit pelayanan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan jenis layanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai IKM 72,32 maka pelayanan publik dikategorikan BAIK dan MEMUASKAN bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

Indikator Prosentase SKPD dan Kab/Kota yang telah di evaluasi SOTK dengan target 100% atau 42 SKPD Provinsi dan 10 Kab/Kota, realisasi 100%.

Indikator Prosentase SKPD yang melakukan Analisis Beban Kerja dalam rangka penyusunan formasi jabatan dengan target kinerja 100% atau 42 SKPD Provinsi dan realisasi 98% atau 41 SKPD Provinsi

Analisis capaian kinerja sasaran 5 (lima) dengan sasaran Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Akuntabel adalah sebagai berikut :

- Indikator Prosentase Laporan Akuntabilitas Kinerja yang sesuai aturan dengan target kinerja 70% tahun 2014 atau 37 (SKPD, Biro) dan realisasi sebesar 90,57% atau 48 (SKPD, Biro) dengan capaian 129%, indikator ini bisa dikatakan berhasil dikarenakan meningkatnya kesadaran SKPD dalam pentingnya menyusun Laporan Kinerja sesuai aturan (Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014) serta dilakukannya kegiatan Asistensi yang dilakukan Biro Organisasi secara intensif.
- Indikator Kinerja Prosentase SKPD yang dinilai Akuntabel (CC) dengan target kinerja 85% (36 SKPD) Tahun 2015 dan Realisasi 83,33% (35 SKPD) dengan capaian 98%, capaian ini merupakan hasil dari Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Prov. Kaltim. Capaian kinerja ini sama seperti tahun 2013, jadi belum ada peningkatan. Kendala yang dihadapi adalah SKPD dalam menyusun Perencanaan yaitu ketidakselarasan

antara penganggaran yang dituangkan dalam Dokumen RKA-SKPD dengan perencanaan yang dituangkan dalam Renstra serta Indikator Sasaran SKPD masih belum berorientasi Outcome (Hasil).

- Indikator Prosentase LAKIP yang diterima dan Prosentase PK yang diterima rata-rata mencapai capaian diatas 90%, indikator ini bisa dikatakan berhasil dikarenakan meningkatnya kesadaran SKPD dan Kab/Kota dalam pentingnya menyusun Laporan Kinerja sesuai aturan (Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014) dan menjadi SKP SKPD.

Permasalahan

1. Perlunya regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Perlunya Pendayagunaan Aparatur dengan mngoptimalkan sistem merit.
3. Perlunya Optimalisasi informasi jabatan untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur .
4. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan yang baik.
5. Belum optimalnya Pengembangan dan Penerapan SAKIP
6. Belum optimalnya Percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Solusi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan kualitas aparatur dengan prinsip good governance.
2. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Peningkatan Pendayagunaan Aparatur.
4. Optimalisasi informasi jabatan untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur .
5. Peningkatan kinerja pemerintahan yang baik.

6. Pengembangan dan Penerapan SAKIP
7. Percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel Tahun 2015 adalah :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program Penataan Organisasi

Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi

Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota

Program Penataan Pendayagunaan Aparatur

Penataan dan Pendayagunaan Aparatur

Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kaltim

Pengembangan Budaya Kerja aparatur

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP

Binwas Pengembangan dan Penerapan SAKIP

- IX. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan Akuntabel. dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

| Tujuan 9 | Sasaran |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan Akuntabel | 13 Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas |

13. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 20 | Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK | WTP | WDP | 75 | Baik |

Hasil Pengukuran pada Tabel 3.14, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas Sekretariat Daerah Provsinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan

1. Ketidaktepatan penyajian aset/ Kekayaan Laporan Keuangan
2. Ketidaktepatan penyajian nilai belanja
3. Ketidaktepatan penyajian pendapatan

Solusi

1. Dibentuk Tim Penjaminan Kualitas Laporan Keuangan
2. Memanfaatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah
3. Memanfaatkan Sistem Informasi Barang Daerah
4. SDM berlatar keuangan

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas Tahun 2015 adalah :

1. Program Peningkatan Sistem dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Per-KDH tentang penjabaran APBD

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian indikator sasaran dan efisiensi penyerapan anggaran, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.15

Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2015

| | Sasaran Strategis | % Capaian | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Tersusunnya LPPD | 100 | 90.77 | 110.17 |
| 2 | Terseleenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 100 | 95.79 | 104.40 |
| 3 | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 85.14 | 93.77 | 90.80 |
| 4 | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | 100 | 96.11 | 104.05 |
| 5 | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 50 | 96.61 | 51.75 |
| 6 | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 100 | 98.20 | 101.83 |
| 7 | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | 100 | 89.96 | 111.16 |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 60 | 100 | 60.00 |
| 9 | Terwujudnya koordinasi bidang | 100 | 78.61 | 127.21 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| | perekonomian | | | |
| 10 | Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat | 93.46 | 84.28 | 110.89 |
| 11 | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | - | - | - |
| 12 | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | 130.78 | 86.06 | 151.96 |
| 13 | Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas | 75 | 67.57 | 111.00 |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan aset | - | - | - |
| 15 | Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum | - | - | - |

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.453.628.610.000,- terealisasi sebesar 534.140.377.124 atau 117,75%
2. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebear Rp. 5.053.998.624.536,79 terealisasi sebesar Rp. 4.253.320.982.625,00 atau 84,16%
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.367.126.430.000,00 terealisasi sebesar Rp.355.652.464.905,00 atau 96,87%

Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2015 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16

Laporan Realisasi Anggaran
31 Desember 2015

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | |
|----------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | PENDAPATAN | 5.874.753.664.536,79 | 5.143.113.824.654,21 | (731.639.839.882,58) | 87,55 |

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 453.628.610.000,00 | 534.140.377.124,21 | 80.511.767.124,21 | 117,75 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 1.044.000.000,00 | 941.254.270,75 | (102.745.729,25) | 90,16 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 267.705.610.000,00 | 310.199.925.478,39 | 42.494.315.478,39 | 115,87 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 184.879.000.000,00 | 222.999.197.375,07 | 38.120.197.375,07 | 120,62 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 5.053.998.624.536,79 | 4.253.320.982.625,00 | (800.677.641.911,79) | 84,16 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 4.995.302.209.536,79 | 4.194.970.542.625,00 | (800.331.666.911,79) | 83,98 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 57.312.515.000,00 | 57.312.515.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 1.383.900.000,00 | 1.037.925.000,00 | (345.975.000,00) | 75,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 367.126.430.000,00 | 355.652.464.905,00 | (11.473.965.095,00) | 96,87 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 15.495.000.000,00 | 3.040.508.000,00 | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 351.631.430.000,00 | 352.611.956.905,00 | 980.526.905,00 | 100,28 |
| 2 | BELANJA | 5.868.360.904.266,80 | 5.743.121.035.000,75 | (125.239.869.266,05) | 97,87 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.650.660.891.149,30 | 5.558.483.899.876,75 | (92.176.991.272,55) | 98,37 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 80.159.260.149,30 | 74.429.161.183,00 | (5.730.098.966,30) | 92,85 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 946.891.710.000,00 | 909.317.897.000,00 | (37.573.813.000,00) | 96,03 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 5.500.000.000,00 | 4.249.500.000,00 | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota | 2.576.755.696.000,00 | 2.563.201.309.381,75 | (13.554.386.618,25) | 99,47 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Partai Politik | 2.031.354.225.000,00 | 2.005.786.032.312,00 | (25.568.192.688,00) | 98,74 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (8.500.000.000,00) | 15,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 217.700.013.117,50 | 184.637.135.124,00 | (33.062.877.993,50) | 84,81 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 51.192.153.750,00 | 39.029.692.000,00 | (12.162.461.750,00) | 76,24 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 133.880.282.367,50 | 117.786.532.214,00 | (16.093.750.153,50) | 87,98 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 32.627.577.000,00 | 27.820.910.910,00 | (4.806.666.090,00) | 85,27 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 6.392.760.269,99 | (600.007.210.346,54) | (606.399.970.616,53) | (9.385,73) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | 0,00 |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 957.155.986.030,82 | 1.050.356.119.713,24 | 93.200.133.682,42 | 109,74 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 957.155.986.030,82 | 1.050.356.119.713,24 | 93.200.133.682,42 | 109,74 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 932.155.986.030,82 | 1.025.356.119.713,24 | 93.200.133.682,42 | 110,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 938.548.746.300,81 | 425.348.909.366,70 | (513.199.836.934,11) | 45,32 |

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Alokasi Anggaran Sasaran dan program Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Pagu | Realisasi | % Capaian | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. | Tersusunnya LPPD | 660.000.000 | 599.068.480 | 90,77 | Biro Pemerintahan Umum |
| 2. | Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional | 1.106.400.000 | 1.059.799.046 | 95,79 | Biro Hukum |
| 3. | Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM | 2.152.234.375 | 2.018.173.012 | 93,77 | Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah |
| 4. | Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM | 1.757.450.000 | 1.689.047.700 | 96,11 | |
| 5. | Meningkatnya kerjasama antar daerah | 2.300.000.000 | 2.222.030.000 | 96,61 | Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah |
| 6. | Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi | 2.251.000.000 | 2.210.449.502 | 98,20 | |
| 7. | Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap | 2.997.950.000 | 2.697.024.645 | 89,96 | Biro Pembangunan Daerah |
| 8. | Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP | 5.148.711.412.014 | 5.148.711.412.014 | 100,00 | |
| 9. | Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian | 568.277.500 | 446.747.600 | 78,61 | Biro Perekonomian |
| 10. | Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat | 4.922.825.000 | 4.148.776.880 | 84,28 | Biro Sosial |
| 11. | Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas | - | - | 0,00 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 12. | Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel | 3.157.817.138 | 2.717.499.174 | 86,06 | Biro Organisasi |
| 13. | Terwujudnya Laporan Keuangan yang berkualitas | 5.327.000.000 | 3.599.411.398 | 67,57 | Biro Keuangan |
| 14. | Terpenuhinya kebutuhan aset | - | - | 0,00 | Biro Perlengkapan |
| 15. | Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum | 47.158.153.000 | 40.800.504.768 | 86,52 | Biro Umum |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim ini disusun mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2015 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa indikator baik input, proses, output, outcome maupun benefit masih belum mempunyai standar baku. Untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya.
2. Beberapa elemen indikator input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membaca. Untuk yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.
3. Belum semua kegiatan teridentifikasi anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan sulitnya memisahkan biaya satu kegiatan dengan yang lain, sehingga banyak kegiatan yang tidak ada terukur anggarannya dalam indikator input. Untuk masa yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *clean goverment* dalam rangka mewujudkan *good governance*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel serta dapat menjadi umpan balik bagi *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan).